

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 20 TAHUN 2014  
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
 PAJAK YANG BERLAKU PADA  
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
 DAN PEMBANGUNAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
 BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	<b>JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TEKNIS SUBSTANSI DI BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA, MANAJEMEN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AKUNTANSI</b> <b>A. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor</b> 1. Pembentukan Auditor Terampil 2. Pembentukan Auditor Ahli 3. Alih Jabatan 4. Penjurangan Auditor Muda 5. Penjurangan Auditor Madya 6. Penjurangan Auditor Utama <b>B. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi di Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara, Manajemen, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntansi</b> 1. Pendidikan dan Pelatihan 4 hari 2. Pendidikan dan Pelatihan 5 hari 3. Pendidikan dan Pelatihan 6 hari 4. Pendidikan dan Pelatihan 7 hari 5. Pendidikan dan Pelatihan 10 hari	  Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang  Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang	  Rp 5.750.000,00 Rp 6.730.000,00 Rp 6.730.000,00 Rp 5.560.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 4.990.000,00  Rp 2.430.000,00 Rp 2.680.000,00 Rp 2.900.000,00 Rp 3.230.000,00 Rp 4.250.000,00
II.	<b>JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA ATAU SEMINAR</b> A. Lokakarya 1 hari B. Lokakarya 2 hari C. Lokakarya 3 hari D. Seminar 1 hari	Per orang Per orang Per orang Per orang	Rp 1.550.000,00 Rp 2.120.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 1.200.000,00
III.	<b>JASA PENILAIAN POTENSI, PENILAIAN KOMPETENSI, FEEDBACK PASCA PENILAIAN KOMPETENSI/POTENSI, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b> <b>A. Penilaian Potensi</b> 1. Psikotes dan Wawancara dengan Laporan Panjang (minimal 30 orang) 2. Psikotes dan Wawancara dengan Laporan Pendek (minimal 30 orang) 3. Psikotes dengan Laporan Panjang (minimal 30 orang) 4. Psikotes dengan Laporan Pendek (minimal 30 orang) 5. Psikotes dengan Laporan Ranking (minimal 30 orang) <b>B. Penilaian Kompetensi</b> 1. <i>Assessment Center</i> 2 hari, untuk Eselon I dan II (minimal 6 orang) 2. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Eselon I dan II (minimal 6 orang) 3. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Eselon III (minimal 6 orang) 4. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Eselon IV dan Staf (minimal 6 orang) <b>C. Feedback Pasca Penilaian Kompetensi/Potensi</b>	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang	Rp 1.100.000,00 Rp 800.000,00 Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.800.000,00 Rp 700.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
<b>D. Pengembangan Kompetensi</b>			
1. Pengembangan Kompetensi 4 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp	4.700.000,00
2. Pengembangan Kompetensi 3 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp	3.500.000,00
3. Pengembangan Kompetensi 2 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp	2.500.000,00
4. Pengembangan Kompetensi 1 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp	1.500.000,00
<b>IV. PENJUALAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
A. Bahan Ajar Dalam Bentuk Cetakan	Per modul	Rp	75.000,00
B. Bahan Ajar Dalam Bentuk Multimedia/ Digital	Per paket	Rp	25.130.000,00
<b>V. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN</b>			
A. Aula Gedung Kampus I (dengan kapasitas 100 orang)	Per 8 jam	Rp	1.200.000,00
B. Aula Gedung Kampus II (dengan kapasitas 80 orang)	Per 8 jam	Rp	1.000.000,00
C. Ruang kelas	Per 8 jam	Rp	350.000,00
D. Laboratorium Komputer	Per 8 jam	Rp	1.500.000,00
E. Mess Kelas 1	Per orang Per hari	Rp	50.000,00
F. Mess Kelas 2	Per orang Per hari	Rp	75.000,00
G. Mess Perwakilan	Per orang Per hari	Rp	75.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

ttd

Lydia Silvanna Djaman